

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN



LKPJ

Dinas Lingkungan Hidup

2022



KABUPATEN MALAKA


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka yang dilaksanakan tahun 2022 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka tahun 2022 bertujuan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka senantiasa mengevaluasi diri serta dapat menjadikannya sebagai bahan untuk mengukur tingkat kesuksesan serta keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan unit agar seiring dan sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggung jawab serta akan menjadi barometer untuk diinventarisir atas kekurangan dan kelebihan yang harus dibenahi maupun dipertahankan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.

Demikian laporan ini kami buat guna penyempurnaan serta penyusunan selanjutnya.

Betun, 2 Maret 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malaka.



dr. Paskalia Frida Fahik
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 200501 2 011

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	11
Bab III Penutup	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	8
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Struktur Organisasi	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	9
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	10
Tabel 1.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	10
Tabel 2.1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	11
Tabel 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	15
Tabel 3.2 Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja	23
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kerja	24
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3.5 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) diperlukan beberapa dinas, badan dan lembaga teknis daerah untuk pelayanan pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.

1.2 DATA UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.2.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka mengacu pada Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 44).

Sesuai dengan Perbup Nomor 77 Tahun 2020, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidu
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, secara hierarki tugas dan tanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup menurut Perbup Nomor 77 Tahun 2020 :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Perumuskan kebijakan teknis dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran;
- c. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran serta rehabilitasi lahan;
- d. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan.

Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Fungsi Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran.

Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran sebagai berikut :

- a. Penyusunan informasi pengeolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilaaan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penangan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA.
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;

- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. Pelaksanaan pemantauan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- z. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Pelaksanaan pembantuan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- gg. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- hh. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ii. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- jj. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- kk. Penentuan baku mutu lingkungan;
- ll. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- oo. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pp. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

- qq. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- rr. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ss. Pelaksanaan penaggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- tt. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- uu. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- vv. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- ww. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- xx. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- yy. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- zz. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- aaa. Perencanaan konservasi dan keanekaragaman hayati;
- bbb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ccc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ddd. Penyelesaian konflik dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- eee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- fff. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Tingkat Pendidikan

1. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Gambaran profil SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dapat disajikan dalam data berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Status
Kepegawaian**

NO	STATUS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14
2	Tenaga Kontrak	50
Total		64

2 Jumlah Pegawai Menurut Bagian/Seksi

Jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan Perbup No. 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka sebanyak 14 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada masing-masing Bidang sesuai dengan struktur organisasi dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Struktur
Organisasi**

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	7
3	Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	3
4	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran	3
5	Tenaga Kontrak Daerah	50
Jumlah		64

3 Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan

Kebutuhan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka adalah golongan IV minimal sebanyak 2 orang dari total keseluruhan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka, secara rinci gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/RUANG	JUMLAH (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	2
3	Penata Tingkat I	III/d	2
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tk I	III/b	-
6	Penata Muda	III/a	5
7	Pengatur Tk. I	II/d	1
8	Pengatur	II/c	-
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			14

4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka cukup beragam mulai pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai jenjang pendidikan Strata 2 (S2). Berikut tabelnya :

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
PNS		
1	Strata 2 (S2)	-
2	Strata 1 (S1)	11
3	Diploma III (D3)	-
4	SMA/Sederajat	3
Tenaga Kontrak Daerah		
1	SMA/Sederajat	45
2	SMP/Sederajat	1
3	SD	4
Jumlah		64

1.2.3 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Tabel 1.5
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi		
	PENDAPATAN	175,000,000	50,000,000	34,000,000	(125,000,000)	68.00%
1	Pendapatan Asli Daerah	175,000,000	50,000,000	34,000,000	(125,000,000)	68.00%
	a. Retribusi Daerah	175,000,000	50,000,000	34,000,000	(125,000,000)	68.00%

1.2.4 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tabel 1.6
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

No	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi		
	BELANJA	2,344,129,318	2,378,913,318	2,075,250,483	34,784,000	87.24%
1	Belanja Operasi	2,283,110,663	2,314,494,663	2,045,983,318	31,384,000	88.40%
	a. Belanja Pegawai	969,762,958	906,462,958	693,987,621	(63,300,000)	76.56%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,313,347,705	1,408,031,705	1,351,995,697	94,684,000	96.02%
2	Belanja Modal	61,018,655	64,418,655	29,267,165	3,400,000	45.43%
	b. Belanja Peralatan dan Mesin;	61,018,655	64,418,655	29,267,165	3,400,000	45.43%

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1			2	3	4	6	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			2,344,129,318	2,378,913,318	14,216,000	2,075,250,483	87.24%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		1,215,427,193	1,237,091,193	27,336,000	984,279,983	79.56%
	A	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	985,322,958	922,022,958	63,300,000	710,767,621	77.09%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	920,402,958	852,062,958	68,340,000	640,807,621	75.21%
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64,920,000	69,960,000	-5,040,000	69,960,000	100.00%
	B	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00%
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00%
	C	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	78,175,680	111,239,680	-33,064,000	111,239,680	100.00%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100.00%

LKPJ DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,124,680	9,297,680	-3,173,000	9,297,680	100.00%
		3	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	7,076,000	11,300,000	-4,224,000	11,300,000	100.00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,475,000	88,142,000	-25,667,000	88,142,000	100.00%
	D		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56,204,555	59,604,555	-3,400,000	24,582,725	41.24%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,840,000	36,240,000	-3,400,000	1,220,000	3.37%
		2	Pengadaan Mebel	16,360,950	16,360,950	0	16,359,735	99.99%
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,003,605	7,003,605	0	7,002,990	99.99%
	E		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,749,000	5,749,000	0	3,889,000	67.65%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,250,000	3,250,000	0	2,500,000	76.92%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2,499,000	2,499,000	0	1,389,000	55.58%
	F		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89,975,000	113,975,000	-24,000,000	109,300,957	95.90%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,975,000	113,975,000	-24,000,000	109,300,957	95.90%

2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
	A	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
		1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
	A	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
		1 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%

LKPJ DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

4	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH		1,094,702,125	1,101,702,125	-7,000,000	1,050,850,500	95.38%
	A	PENGELOLAAN SAMPAH	1,094,702,125	1,101,702,125	-7,000,000	1,050,850,500	95.38%
		1 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pegelolaan Persampahan	1,029,000,000	1,036,000,000	-7,000,000	986,500,000	95.22%
		2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65,702,125	65,702,125	0	64,350,500	97.94%

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP		2,378,913,318		2,075,250,483		87.24%						
No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		1,237,091,193		984,279,983		79.56%				
		A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
			TOTAL PAGU		922,022,958							
			TOTAL REALISASI		710,767,621							
			PENCAPAIAN		77.09%							
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pagu	852,062,958	Realisasi	640,807,621	Karena Kelebihan PAGU pada Gaji	Ketika Menyiapkan PAGU Anggaran harus memperhatikan Jumlah Pegawai			
				TARGET:		Ach	75.21%					
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Output	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN						
					Outcoume	Meningkatnya Kesejahteraan ASN						
					Immediate Outcome	Meningkatnya Kinerja ASN						
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pagu	69,960,000	Realisasi	69,960,000					
				TARGET:		Ach	100.00%					
Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output			Terbayarnya Honorarium Jasa Pengelola Keuangan, BMD dan Tenaga Administrasi								

					Outcoume	Meningkatnya Kesejahteraan Jasa Pengelola Keuangan, BMD dan Tenaga Administrasi			
					Immediate Outcome	Meningkatnya Kinerja Jasa Pengelola Keuangan, BMD dan Tenaga Administrasi			
B	Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah								
	TOTAL PAGU		24,500,000						
	TOTAL REALISASI		24,500,000						
	PENCAPAIAN		100.00%						
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pagu	24,500,000	Realisasi	24,500,000			
			TARGET:		Ach	100.00%			
			Terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Output	Terlaksananya Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				
				Outcoume	Kinerja pegawai terukur				
				Immediate Outcome	Hasil Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dapat diimplementasikan				
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
TOTAL PAGU		111,239,680							
TOTAL REALISASI		111,239,680							
PENCAPAIAN		100.00%							
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pagu	2,500,000	Realisasi	2,500,000			
			TARGET:		Ach	100.00%			
			Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan di gedung kantor	Output	Tersedianya alat-alat listrik				
				Outcoume	Terpasangnya listrik di kantor				
				Immediate Outcome	Urusan perkantoran lebih lancer				
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pagu	9,297,680	Realisasi	9,297,680			
	TARGET:		Ach	100.00%					

				Tersedianya bahan logistik kantor	Output	Tersedianya meubeler, meja dan kursi kerja pejabat			
					Outcoume	Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja			
					Immediate Outcome	Urusan perkantoran lebih lancar			
				Pagu	11,300,000	Realisasi	11,300,000		
				TARGET:		Ach	100.00%		
				Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Output	Tersedianya alat/bahan untuk kegiatan kantor berupa kertas dan cover serta bahan cetak			
					Outcoume	Untuk memperlancar administrasi kantor			
					Immediate Outcome	Dengan adanya Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan sangat membantu dalam proses pekerjaan di kantor			
				Pagu	88,142,000	Realisasi	88,142,000		
				TARGET:		Ach	100.00%		
				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
					Outcoume	Koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan Tercapai			
					Immediate Outcome	Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi dapat diimplementasikan			

D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	TOTAL PAGU		59,604,555					
	TOTAL REALISASI		24,582,725					
	PENCAPAIAN		41.24%					
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pagu	36,240,000	Realisasi	1,220,000	Interval waktu antara penetapan anggaran perubahan dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 teralalu singkat untuk melakukan proses pengadaan langsung kendaraan roda dua (2) melalui e-catalog dan pelaksanaan kontraknya	Akan diperhatikan dalam perencanaan tahun berikut
			TARGET:		Ach	3.37%		
			Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Output	Tidak terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		
					Outcoume	Tidak tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		
					Immediate Outcome	Tidak ada perubahan terkait kendaraan dinas operasional atau lapangan		
	2	Pengadaan Mebel	Pagu	16,360,950	Realisasi	16,359,735	Sisa Tender yang tidak bisa di SPJkan	Akan diperhatikan dalam perencanaan tahun berikut
			TARGET:		Ach	99.99%		
			Terlaksananya Pengadaan Mebel		Output	Tersedianya Meja 1/2 Biro, Kursi Chrom dan Meja Biro		
					Outcoume	Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja		
					Immediate Outcome	Urusan perkantoran lebih lancer		
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pagu	7,003,605	Realisasi	7,002,990	Sisa Tender yang tidak bisa di SPJkan	Akan diperhatikan dalam perencanaan tahun berikut
			TARGET:		Ach	99.99%		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya serta meningkatnya kinerja pegawai		Output	Tersedianya peralatan komputer/PC		
					Outcoume	meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja		
					Immediate Outcome	Kinerja pegawai menjadi meningkat		

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	TOTAL PAGU		5,749,000					
	TOTAL REALISASI		3,889,000					
	PENCAPAIAN		67.65%					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pagu	3,250,000	Realisasi	2,500,000	Untuk item jasa paket pengiriman tidak ada sehingga tidak diSPJkan	Akan diperhatikan dalam perencanaan tahun berikut
			TARGET:		Ach	76.92%		
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Output	Terlaksananya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos berupa materai		
					Outcoume	Surat-surat dinas yang menggunakan materai dapat terlaksanakan		
					Immediate Outcome	Pelaksanaan tugas dan pelayanan berjalan dengan baik		
			Pagu	2,499,000	Realisasi	1,389,000		
			TARGET:		Ach	55.58%		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Output	Terlaksananya belanja pulsa listrik dan pulsa telpon selama 12 bulan	Sumber Daya Listrik masih digunakan bersama Sekolah (SMPN Negeri Malaka Tengah)	Pemasangan Meteran Listrik khusus untuk DLH di tahun berikutnya
					Outcoume	Pulsa listrik dan pulsa telpon digunakan dengan baik dan terselesaikan		
					Immediate Outcome	Pelaksanaan tugas dan pelayanan di kantor berjalan dengan baik		

2	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		TOTAL PAGU	113,975,000					
		TOTAL REALISASI	109,300,957					
		PENCAPAIAN	95.90%					
		1	Pagu	113,975,000	Realisasi	109,300,957	Kelangkaan suku cadang pada kendaraan roda tiga	Akan diperhatikan dalam perencanaan tahun berikut
			TARGET:		Ach	95.90%		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Output	Tersedianya belanja pemeliharaan, pajak perizinan dan BBM kendaraan dinas		
					Outcoume	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja		
					Immediate Outcome	Pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan lancer		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		20,060,000	20,060,000	100.00%		
		A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
			TOTAL PAGU	20,060,000				
			TOTAL REALISASI	20,060,000				
			PENCAPAIAN	100.00%				
			1	Pagu	20,060,000	Realisasi	20,060,000	
				TARGET:		Ach	100.00%	
				Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Output	Tersampainya informasi terkait Pencemaran Lingkungan Hidup kepada masyarakat	
						Outcoume	Masyarakat mendapatkan informasi terkait pencegahan pencemaran lingkungan	

					Immediate Outcome	Masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait penanganan dan pengolahan sumber pencemaran lingkungan			
3			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		20,060,000	20,060,000	100.00%		
		A	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah						
			TOTAL PAGU		20,060,000				
			TOTAL REALISASI		20,060,000				
			PENCAPAIAN		100.00%				
		1	Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pagu	20,060,000	Realisasi	20,060,000		
				TARGET:		Ach	100.00%		
				Terlaksananya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Output	Tersampainya informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah		
						Outcoume	Pelaku usaha dan/atau kegiatan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait izin lingkungan		
						Immediate Outcome	Kesadaran Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengurus izin lingkungan meningkat		

LKPJ DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

4	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH			1,101,702,125	1,050,850,500	95.38%			
	A	Pengelolaan Sampah							
		TOTAL PAGU		1,101,702,125					
		TOTAL REALISASI		1,050,850,500					
		PENCAPAIAN		95.38%					
	1	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pegelolaan Persampahan	Pagu	1,036,000,000	Realisasi	986,500,000	Kelebihan PAGU pada Honorarium Tenaga Kebersihan	Akan diperhatikan dalam perencanaan tahun berikut	
			TARGET:		Ach	95.22%			
			Tersedianya jasa tenaga kebersihan lingkungan	Output	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak daerah				
				Outcoume	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kontrak daerah				
				Immediate Outcome	Meningktanya kinerja tenaga kontrak daerah				
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pagu	65,702,125	Realisasi	64,350,500	Kelebihan PAGU pada Belanja Modal Sepatu Lapangan	Akan diperhatikan dalam perencanaan tahun berikut	
			TARGET:		Ach	97.94%			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	Output	Terlaksananya belanja sarana prasarana persampahan				
				Outcoume	Tersedianya sarana prasarana berupa APD, Garpu Sampah, Tempat Sampah Mobile, Sapu Lidi Gagang Kayu, Sekop.				
				Immediate Outcome	Meningktanya kinerja petugas				

3.2. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

3.2.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.2
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Persen	100%
	2	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	Persen	100%
	3	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	Persen	100%
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1 Dokumen
	2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1 Dokumen
	3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah	20 Kali
	4	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2 Orang
	5	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	Dokumen	7 Dokumen
	6	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100%
	7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	100%

3.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100%	100%
	2	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	100%	100%
	3	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	100%	100%
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen
	2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen
	3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	20 Kali	20 Kali
	4	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah di Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang
	5	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen
	6	Persentase cakupan area pelayanan	100%	8,3%
	7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	54%

3.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (2022)	Realisasi (2022)	Target (2021)	Realisasi (2021)
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100%	100%	-	-
	2 Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	100%	100%	-	-
	3 Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	100%	100%	-	-
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	2 Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	3 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	20 Kali	20 Kali	-	-
	4 Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah di Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
	5 Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	6 Persentase cakupan area pelayanan	100%	8,3%	-	-
	7 Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	54%	-	-

3.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

- Capaian sasaran strategis 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan target 100%
 - 2) Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD dengan target sebesar 100%.
 - 3) Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD dengan target sebesar 100%.
- Capaian sasaran strategis 2: Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan dengan indikator indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten. Dokumen KLHS dengan target sebanyak 1 dokumen yang program dan kegiatan serta anggaran ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka.
 - 2) Tersedianya Dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERKADA dengan target sebanyak 1 dokumen. Pada tahun 2022, sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka telah menyusun Dokumen JAKSTRADA yaitu Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Malaka Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 21 Tahun 2022. Penilaian terhadap indikator kinerja ini, apabila dilihat dari uraian tersebut dapat mencapai 100% atau dapat dikatakan bahwa skala nilai peringkat kinerja Dinas LH Kabupaten Malaka pada ini indikator ini dengan kategori sangat tinggi.
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan target 20 kali. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap izin yang telah diterbitkan.

- 4) Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Pada indikator ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memiliki 2 (dua) tenaga Pengawas Lingkungan Ahli Pertama. Tenaga Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama yang dimiliki belum mengikuti Uji Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosiokultur sesuai standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- 5) Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pada indikator ini, Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan terhadap Dokumen UKL-UPL sebanyak 7 Dokumen.
- 6) Persentase cakupan area pelayanan dan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Pada indikator ini, Rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah sebagai berikut :
 - Jumlah produksi sampah sebesar 29,8 m³/hari yang dihitung dari jumlah penduduk dikali standar SNI 0,7/liter/orang/hari (jumlah penduduk 42.614 orang x 0,7);
 - Volume sampah yang ditangani setiap hari 16 m³/hari. Hasil estimasi ini merujuk pada jumlah truck pengangkut sampah berjumlah 2 (dua) unit dengan kapasitas angkut masing-masing adalah 7 m³ dan 9 m³ per hari.
 - Cakupan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Malaka Tengah dengan presentasi 8,3% dari target 100%.
 - Presentase jumlah sampah yang ditangani 54% dari target 100%.

3.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Tabel 3.5
Kebijakan Strategi yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Malaka	Peraturan Bupati Malaka Nomor 21 Tahun 2022	Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

BAB III PENUTUP

Laporan LKPJ ini menguraikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Beberapa yang belum tercapai dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran ini, merupakan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dengan upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, bersih serta berorientasi pada kebutuhan rakyat. Upaya berkelanjutan tetap dilakukan melalui kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Laporan ini kiranya dapat memberikan dan memenuhi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dalam melaksanakan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup serta dapat menjadi bahan penyusunan LKPJ Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022.

Betun, 2 Maret 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malaka



drg. Paskalia Frida Fahik
Pembina Utama Muda
NIP: 19710410 200501 2 011